

PERBANDINGAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM PENGURANGAN PENGANGGURAN

Vina Terina Dea Anggita¹, Arif Zainudin², Agus Setio Widodo³

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pancasakti Tegal

1anggitterina@gmail.com, 2aguswidodo@upstegal.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare labor market policies in Indonesia and Australia in their efforts to reduce unemployment. Unemployment is understood as a structural issue influenced by labor market conditions, the quality of human resources, and the institutional capacity of the state. This research employs a qualitative method with a comparative public policy approach. Data are collected through a literature review and document analysis of regulations, official government reports, and relevant academic publications related to labor policies in both countries. The analysis is conducted using a descriptive-comparative method by examining labor market policies, vocational training systems, labor market information systems, and social protection measures. The findings indicate that Australia has more effective and adaptive labor policies, supported by strong institutional capacity, an integrated labor market data system, and active labor market policies that are responsive to economic changes. In contrast, Indonesia continues to face significant challenges, including the dominance of the informal sector, skills mismatches within the workforce, and weak coordination and implementation of labor policies. The study concludes that strengthening cross-sectoral collaboration, developing a comprehensive labor market information system, and expanding active labor market policies are key strategies to improving the effectiveness of labor policies in Indonesia.

Keywords: labor policy, unemployment, labor market, comparative study, Indonesia and Australia

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia dan Australia dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran. Pengangguran dipahami sebagai persoalan struktural yang dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja, kualitas sumber daya manusia, serta kapasitas institusional negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif kebijakan publik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap regulasi, laporan resmi pemerintah, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan kebijakan ketenagakerjaan di kedua negara. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan menelaah kebijakan

pasar tenaga kerja, pelatihan vokasional, sistem informasi pasar tenaga kerja, serta perlindungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia memiliki kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan adaptif, yang didukung oleh kapasitas institusional yang kuat, sistem data pasar tenaga kerja yang terintegrasi, serta kebijakan pasar kerja aktif yang responsif terhadap perubahan ekonomi. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi sektor informal, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta lemahnya koordinasi dan implementasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor, pengembangan sistem informasi tenaga kerja yang komprehensif, serta perluasan kebijakan pasar kerja aktif merupakan kunci untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

Kata Kunci: kebijakan ketenagakerjaan, pengangguran, pasar tenaga kerja, studi komparatif, Indonesia dan Australia

Catatan : Nomor HP tidak akan dicantumkan, namun sebagai fast respon apabila perbaikan dan keputusan penerimaan jurnal sudah ada.

A. Pendahuluan

Pengangguran merupakan persoalan fundamental yang dihadapi oleh seluruh negara, baik negara berkembang maupun negara maju, karena berkaitan langsung dengan pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran sering digunakan sebagai indikator keberhasilan kebijakan pembangunan nasional serta cerminan kondisi pasar tenaga kerja. Tingginya angka pengangguran dapat memicu berbagai dampak negatif, seperti peningkatan kemiskinan, ketimpangan sosial, kerentanan ekonomi rumah tangga,

konflik sosial, hingga instabilitas politik(Rifa, 2023). Oleh karena itu, upaya penanggulangan pengangguran menjadi prioritas utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik, khususnya kebijakan ketenagakerjaan.

Dalam perspektif ekonomi tenaga kerja, pengangguran tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, seperti ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, rendahnya produktivitas, rigiditas regulasi pasar tenaga kerja, serta lemahnya sistem

informasi pasar tenaga kerja. Tantangan tersebut semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan digitalisasi, otomatisasi, dan perubahan struktur industri global yang menuntut tenaga kerja dengan keterampilan baru dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Namun demikian, sistem pendidikan dan pelatihan di banyak negara berkembang belum sepenuhnya mampu merespons dinamika kebutuhan pasar kerja yang terus berubah (Подунай, 2023).

Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk besar, Indonesia menghadapi permasalahan ketenagakerjaan yang bersifat multidimensional. Setiap tahun, jutaan angkatan kerja baru memasuki pasar tenaga kerja, sementara kemampuan perekonomian untuk menyerap tenaga kerja produktif masih terbatas (Nusantara & Vol, 2024). Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia menunjukkan tren penurunan dan tercatat sekitar 4,91% pada November 2024, data tersebut masih menyembunyikan berbagai persoalan struktural yang belum terselesaikan (Dan et al., 2023). Tingginya proporsi pekerja informal,

setengah menganggur, serta pekerja dengan jam kerja rendah menunjukkan bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kuantitas pekerjaan, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan pekerjaan (Holivil, 2024).

Dominasi sektor informal menjadi salah satu karakteristik utama pasar tenaga kerja Indonesia. Pekerjaan di sektor ini umumnya ditandai oleh produktivitas rendah, pendapatan yang tidak stabil, serta minimnya perlindungan sosial (Sholikin, 2024). Kondisi tersebut menyulitkan implementasi kebijakan ketenagakerjaan karena sebagian besar pekerja berada di luar jangkauan regulasi formal. Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan formal dan kebutuhan industri, sehingga dunia usaha kesulitan memperoleh tenaga kerja yang sesuai, sementara tingkat pengangguran terdidik tetap tinggi (Williams et al., 2023).

Pemerintah Indonesia telah merespons permasalahan tersebut melalui berbagai kebijakan ketenagakerjaan, antara lain peningkatan pelatihan vokasional,

revitalisasi balai latihan kerja, reformasi regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, serta pembangunan Sistem Informasi Pasar Kerja (Putri et al., 2023.). Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan kapasitas institusional, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan data yang akurat dan mutakhir, serta perbedaan implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah (Arsad et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran di Indonesia merupakan masalah struktural yang memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Sebagai perbandingan, Australia sebagai negara maju memiliki sistem pasar tenaga kerja yang relatif lebih stabil dan terkelola dengan baik. Kerangka regulasi yang kuat, sistem perlindungan sosial yang responsif, serta kebijakan pasar tenaga kerja aktif yang terorganisasi menjadi fondasi utama kebijakan ketenagakerjaan di Australia (Moh Zaini, 2022). Perumusan kebijakan berbasis bukti didukung oleh

ketersediaan data pasar tenaga kerja yang akurat dan terkini, sehingga memungkinkan pemerintah melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kerja jangka panjang secara efektif (von der Heidt, 2020).

Keberhasilan Australia dalam merespons krisis ekonomi, khususnya selama pandemi COVID-19 melalui program subsidi upah dan perluasan tunjangan pengangguran, menunjukkan pentingnya kapasitas fiskal, kecepatan pengambilan keputusan, dan koordinasi institusional dalam menekan lonjakan pengangguran serta menjaga keberlanjutan hubungan kerja (Emes & Polic, 2024).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia dan Australia melalui pendekatan studi komparatif. Studi komparatif kebijakan dipandang relevan karena memungkinkan identifikasi faktor keberhasilan, praktik terbaik, serta kelemahan struktural kebijakan ketenagakerjaan pada negara dengan tingkat pembangunan yang berbeda, tanpa bermaksud meniru kebijakan secara langsung (Dwiputrianti & Publik, 2023).

Fokus kajian meliputi kebijakan pasar tenaga kerja, pelatihan vokasional, sistem penempatan kerja, sistem informasi pasar tenaga kerja, serta kebijakan perlindungan sosial dan subsidi upah, khususnya dalam menghadapi kondisi krisis ekonomi (Nofiantoro & Affandi, 2021).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif kebijakan publik. Subjek penelitian berupa kebijakan ketenagakerjaan Indonesia dan Australia, yang dianalisis melalui dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, laporan kementerian/lembaga terkait, serta publikasi ilmiah yang relevan. Instrumen penelitian berupa panduan analisis dokumen dan kerangka perbandingan kebijakan yang disusun berdasarkan literatur kebijakan publik.

Desain penelitian menggunakan comparative qualitative research, dengan teknik pemilihan data melalui purposive sampling, yaitu pemilihan sumber data yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian (Aneta et al., 2024). Variabel yang dianalisis meliputi karakteristik utama kebijakan ketenagakerjaan, efektivitas kebijakan pasar tenaga kerja, sistem

perlindungan sosial, serta regulasi ketenagakerjaan dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-komparatif, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model analisis merujuk pada analisis kebijakan publik kualitatif dan comparative policy analysis, dengan penekanan pada pemahaman konteks ekonomi, sosial, dan institusional masing-masing negara (Knapińska, 2024). Penelitian ini tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan analisis interpretatif terhadap substansi kebijakan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia

Menghadapi berbagai persoalan struktural yang kompleks, antara lain dominasi sektor informal, tingkat pengangguran yang relatif tinggi, serta ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar kerja Indonesia belum sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja

secara optimal. Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah merumuskan kebijakan ketenagakerjaan sebagai instrumen strategis pembangunan. Salah satu kebijakan utama adalah Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) 2020–2024 yang disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan ketenagakerjaan nasional (Mulya et al., 2024). Implementasi RTKN menitikberatkan pada peningkatan daya saing tenaga kerja melalui penguatan pelatihan vokasional berbasis kompetensi. Pemerintah melakukan perluasan dan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), baik yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak swasta. Kurikulum pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi, sehingga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan keterampilan yang selama ini menjadi hambatan utama penyerapan tenaga kerja. Pendekatan yang mengintegrasikan dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dan sektor industri menjadi strategi penting dalam

kebijakan ketenagakerjaan Indonesia (Wispandono et al., 2020).

Selain aspek pelatihan, kebijakan ketenagakerjaan Indonesia juga diarahkan pada penguatan sistem penempatan tenaga kerja. Pengembangan Labour Market Information System (LMIS) ditujukan sebagai basis data terpadu yang memuat informasi mengenai permintaan dan penawaran tenaga kerja, struktur upah, serta proyeksi kebutuhan keterampilan. Sistem ini diharapkan mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti sekaligus meningkatkan efektivitas proses pencocokan kerja. Namun demikian, implementasi kebijakan ketenagakerjaan Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, terutama tingginya tingkat informalitas tenaga kerja yang menunjukkan keterbatasan sektor formal dalam menyediakan lapangan kerja yang layak dan terlindungi (Nuraeni & Gunawan, 2023). Tantangan lain yang muncul adalah ketimpangan distribusi program pelatihan antarwilayah, yang menyebabkan manfaat kebijakan belum dirasakan secara merata, khususnya di daerah tertinggal dan perdesaan. Keterbatasan

infrastruktur, kualitas instruktur, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penguatan integrasi kebijakan pusat dan daerah, peningkatan kualitas data pasar kerja, serta kolaborasi strategis dengan sektor swasta menjadi langkah penting untuk meningkatkan kinerja kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia (Journal et al., 2024).

Kebijakan Ketenagakerjaan di Australia

Berbeda dengan Indonesia, Australia dikenal memiliki kebijakan ketenagakerjaan yang relatif matang, fleksibel, dan berbasis bukti. Pemerintah Australia secara konsisten mengombinasikan kebijakan pasar tenaga kerja aktif dan pasif untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendekatan ini memungkinkan sistem ketenagakerjaan Australia lebih adaptif terhadap siklus ekonomi, perubahan teknologi, dan dinamika pasar kerja global. Salah satu contoh kebijakan yang menonjol adalah JobKeeper Payment, yang dirancang sebagai respons cepat terhadap

dampak ekonomi pandemi COVID-19. Kebijakan ini bertujuan mempertahankan hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja melalui pemberian subsidi upah kepada perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan. Kebijakan tersebut terbukti mampu menahan lonjakan pengangguran dan mempercepat pemulihan pasar tenaga kerja pascapandemi (Emes & Polic, 2024).

Keberhasilan JobKeeper mencerminkan kapasitas fiskal dan administratif Australia dalam merancang serta melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan secara cepat dan terukur. Selain kebijakan tanggap darurat, Australia secara struktural mengandalkan kebijakan pasar tenaga kerja aktif melalui program jobactive. Program ini menyediakan layanan pelatihan berbasis kebutuhan pasar, pendampingan pencari kerja, dan fasilitasi penempatan kerja dengan kewajiban partisipasi aktif dari pencari kerja. Integrasi antara penyedia pelatihan, lembaga ketenagakerjaan, dan sektor industri membuat proses penyesuaian keterampilan menjadi lebih efisien dan mengurangi

ketimpangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja (Hovelsrud et al., 2023).

Keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan Australia juga ditopang oleh sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang kuat, khususnya melalui kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan teknik. Kurikulum pelatihan disesuaikan dengan perkembangan industri strategis seperti teknologi digital, energi terbarukan, dan layanan kesehatan. Dengan demikian, kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi pada penurunan pengangguran, tetapi juga pada peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja dalam jangka panjang (Skiba, 2020).

Hal ini sejalan dengan dokumen White Paper "The Future of Work" yang menegaskan pentingnya perencanaan keterampilan jangka panjang, koordinasi antar pemerintah, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi (Treasury Australia)(Quiggin, 2024).

Perbandingan Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia dan Australia

Menunjukkan perbedaan signifikan dalam kapasitas institusional, sistem data, serta efektivitas respons kebijakan. Australia mampu merespons krisis ketenagakerjaan dengan cepat melalui skema subsidi upah dan bantuan pencari kerja, sementara Indonesia lebih mengandalkan program padat karya dan subsidi terbatas yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, namun kurang efektif dalam mempertahankan hubungan kerja jangka panjang (Presiden, Universitas Cakranegara, 2020).

Selain itu, ketidaksesuaian keterampilan masih menjadi persoalan utama di Indonesia, meskipun program pelatihan vokasional terus dikembangkan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pengurangan pengangguran sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu kapasitas institusional, kualitas data pasar tenaga kerja, kolaborasi dengan sektor industri, serta ketepatan dan kecepatan intervensi

kebijakan. Australia unggul dalam keempat aspek tersebut karena didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat, data pasar kerja yang terintegrasi, kemitraan industri yang solid, serta kemampuan merespons krisis secara cepat dan adaptif. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam koordinasi antarlembaga, integrasi data lintas sektor, serta pemerataan dan kualitas program (Rizki et al., 2022)(Dwianto et al., 2023).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis komparatif, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan Australia lebih efektif dalam menekan dampak pengangguran dibandingkan Indonesia karena ditopang oleh kebijakan pasar kerja aktif yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data. Keberhasilan tersebut tercermin dari kuatnya sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor industri, didukung oleh sistem informasi tenaga kerja yang komprehensif serta kapasitas fiskal yang memungkinkan respons kebijakan yang cepat dan tepat terhadap dinamika ekonomi. Sebaliknya, Indonesia masih

menghadapi berbagai tantangan struktural dalam penanggulangan pengangguran, terutama terkait ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, dominasi sektor informal, keterbatasan sistem informasi tenaga kerja, serta lemahnya koordinasi kebijakan antarlembaga. Oleh karena itu, penguatan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia perlu diarahkan pada peningkatan kolaborasi strategis antara dunia pendidikan dan dunia usaha, pengembangan sistem informasi tenaga kerja yang terintegrasi dan mutakhir, serta perluasan kebijakan pasar kerja aktif yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, fleksibilitas kebijakan fiskal menjadi faktor penting agar pemerintah mampu merespons tekanan ekonomi secara efektif, sehingga kebijakan ketenagakerjaan dapat berkontribusi secara optimal dalam menurunkan tingkat pengangguran secara berkelanjutan (Riset et al., 2024)

DAFTAR PUSTAKA

Aneta, A., Aneta, Y., & Hamim, U. (2024). *Analysis of Unemployment Policy Program in Bonebolango District*. 2024, 82–92.
<https://doi.org/10.18502/kss.v9i7>.

- 15467
- Arsad, B. A., Ulya, I. K., Deanova, B. S. V., Saputri, B. T. J., Aulia, H., Rahmah, L., Mu'afar, R., Alghifari, R. A., Anum, S., & Gibran, Z. R. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Desa (Sid) Berbasis Website Di Desa Rempok Darussalam Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 4(2), 91–95. <https://doi.org/10.29303/jwd.v4i2.184>
- CINDY SILVIA AGUSTIN. (2023). *At-Taujih : Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Upaya Menurunkan Kecemasan Menjadi Pengangguran Melalui Strategi Konseling*. 1, 79–87.
- Dan, K., Akibat, P., Balumbung, D. I. D., & Tompobulu, K. E. C. (2023). BANTAENG POVERTY AND UNEMPLOYMENT DUE TO COVID-19 IN BALUMBUNG VILLAGE, KEC. TOMPOBULU, KAB. 1(2), 408–416.
- Dwianto, R. A., Darmawan, A. B., Zaenuri, M., & Fitrah, E. (2023). *Jurnal Public Policy Analysis of Indonesian Government Policies in Response to the Covid-19 Pandemic- Induced Mass Layoffs*. 1.
- Dwiputrianti, S., & Publik, S. (2011). *Evaluasi Kebijakan dalam Upaya Peningkatan Mutu Human Capital di Sektor Publik (Comparative study dengan Australia) 1 Latar Belakang Banyak pertanyaan dari publik atau masyarakat dari berbagai kalangan mengenai*. 1–21.
- Emes, J. R., & Polic, c. (2024). LONG-TERM EMPLOYMENT POLICY. 2, 5–19. <https://doi.org/10.52174/1829-0280>
- gholbi. (2024). *Link and match learning on the quality of vocational graduates in Banten province , Indonesia*. December, 91–99. <https://doi.org/10.53889/jgl.v4i2.392>
- Holivil, E. (2024). *Ketimpangan Ketenagakerjaan dan Dinamika Kemiskinan di NTT: Analisis Faktor Penyebab dan Implikasi Kebijakan Employment Inequality and Poverty Dynamics in NTT: An Analysis of Causal Factors and Policy Implications*. XX(2), 203–226. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i2.374>
- Hovelsrud, G. K., Olsen, J., Nilsson, A. E., Kaltenborn, B., & Lebel, J. (2023). Managing Svalbard Tourism: Inconsistencies and Conflicts of Interest. *Arctic Review on Law and Politics*, 14, 86–106. <https://doi.org/10.23865/arctic.v14.5113>
- Journal, T. I., Clinical, I., & Education, L. (2024). *Causes of Low Absorption of Local Workers to Labor Fulfillment in Indonesia*. 6(4), 507–530.
- Knapińska, M. (2024). *The impact of labour market policies on outcomes in OECD countries : An empirical analysis*. 38–52. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2024/17-2/2>
- moh zaini. (2022). No Title.
- Mulya, N. P., Tinggi, S., Buddha, A., & Sriwijaya, N. (2024). NAVIGATING THE TIDES OF CHANGE : A COMPREHENSIVE. 2(1), 15–32.
- Nofiantoro, W., & Affandi, D. Y. (2021). *Vocational Schools and Labour Market: Insights from Indonesia*. 2018, 625–645. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i1.1.2793>
- Nuraeni, Y., & Gunawan, B. T. (2023).

- Development of labor market information system in Indonesia towards world class.* 53(1), 1–14.
- Nusantara, B., & Vol, M. E. (2024). 1, 2 1,2. 3(1), 20–24.
<https://doi.org/10.55123/sabana.v3i1.3302>
- Presiden, UniversitasCakranegara, P. A. (2008). *Abs tract.* 36–46.
- Putri, S. Y., Pd, S., Si, M., Internasional, I. H., Ilmu, F., & Politik, I. (n.d.). *Upaya Pemerintah Indonesia di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Meningkatkan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan.* September 2018, 19–33.
- Quiggin, J. (2024). *Full employment and working future.* 195–206.
<https://doi.org/10.1017/elr.2024.8>
- Radha, P. (2024). *A Study on Addressing Unemployment: Strategies and Policies for Enhancing Job Creation NPRC Journal of Multidisciplinary Research.* 1(9), 96–105.
- Riset, J., Rifqi, M., Al, S., Ekonomi, F., Agustus, U., Yasin, M., Ekonomi, F., & Agustus, U. (2024). *Analisis Pengangguran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perekonomian Indonesia Jenis-Jenis Pengangguran.* 2(3), 34–42.
- Rivani, E. (2023). *Enhancement of Productivity to Improve Indonesia's Labor Competitiveness.* 1091–1097.
- Rizki, A., Ginata, S., Pandu, P., Handayani, N., & Aditya, P. (2022). *Comparison of Covid-19 Control Policies Between Indonesia and Australia Based on the Perspective of Policy Capacity Theory.* 18(148), 279–294.
<https://doi.org/10.24258/jba.v18i3.1080>
- Sholikin, A. (2024). “Social Security” bagi Tenaga Kerja Informal pada Sektor Industri Ekstraktif di Bojonegoro. 16(2).
- skiba, richard. (2020). *MANAGING AUSTRALIAN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING FOR ECONOMIC RECOVERY Richard Skiba To cite this version: HAL Id: halshs-02982064.*
- von der Heidt, T. (2020). *Overview VET in Australia.*
- Williams, L., Lucrezi, S., Cowley, P., & Gennari, E. (2023). *Stakeholders' perceptions of the conservation and management of elasmobranchs in South Africa. Marine Policy, 157.*
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105847>
- Wispondono, R. M. M., Sri, E., Ningsih, R., & Yuherawan, D. S. B. (2020). *Revitalization Model of Balai Latihan Kerja (Blk) For Improving Knowledge , Education , And Skills Of Migrant Worker Based On Link And Match.* 01011.
- Подунай, В. В. (2023). *No Title.* 1394, 5–14.
<https://doi.org/10.34079/2226-2822-2023-13-25-5-14>